

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2017

Jln. R.A. Kartini No. 18/23

MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667

e-mail : pnmks.keuangan@gmail.com



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jln. R.A. Kartini No. 18/23

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667

MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

e-mail : admin@pn-makassar.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Makassar adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

MAKASSAR, 18 Juli 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,

MUHAMMAD AKHZAN, SH., MH
NIP.196802041999031001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A. Penjelasan Umum	21
A.1. Dasar Hukum.....	21
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Makassar	22
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	23
A.4. Basis Akuntansi	23
A.5. Dasar Pengukuran	23
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	24
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	32
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	32
B.2. Belanja.....	33
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	36
C.1. Aset Lancar.....	36
C.2. Aset Tetap	37
C.3. Piutang Jangka Panjang.....	42
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	43
C.6. Ekuitas	43
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	44
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	44

D.2.	Beban Pegawai	44
D.3.	Beban Persediaan	45
D.4.	Beban Jasa.....	46
D.5.	Beban Pemeliharaan	46
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	46
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	47
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	48
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	48
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	49
D.11.	Beban Lain-lain.....	49
D.12.	Kegiatan Non Operasional	50
D.13.	Pos Luar Biasa	50
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	51
E.1.	Ekuitas Awal	51
E.2.	Surplus (defisit) LO	51
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan.....	51
E.4.	Koreksi Aset Tetap	52
E.5.	Koreksi atas Beban	52
E.6.	Koreksi atas Pendapatan.....	52
E.7.	Ekuitas Akhir.....	53
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	53
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	53
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	53
	Laporan-laporan Pendukung.....	55
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	56
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual.....	59

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 dan 2015	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2016 dan 2015.....	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	30
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	31
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2016.....	32
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2016 dan 2015	32
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016	33
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016.....	33
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015	34
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015	34
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015.....	35
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015.....	35
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2016 dan 2015	36
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	36
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2016 dan 31 Desember 2015	37
Tabel 25 Rincian Aset Tetap	38
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah	38
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	42
Tabel 28 Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	42
Tabel 33. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2016 dan 2015	43
Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2016.....	57
Tabel 39 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	60

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Makassar

Jln. R.A. Kartini No. 18/23 MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667 e-mail : admin@pn-makassar.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

MAKASSAR, 18 Juli 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,

MUHAMMAD AKHZAN, SH., MH
NIP.196802041999031001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2017 s.d. 30 Juni 2017 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 101.826.100 atau mencapai 838,26 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 12.147.330.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 9.772.721.477 atau mencapai 45,53 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 21.465.500.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017			TA 2016
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	12.147.330	101.826.100	838,26	9.714.904
Belanja Negara	21.465.500.000	9.772.721.477	45,53	9.161.022.236

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2017 dan 2016.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 49.625.542.590, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 70.399.642; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 49.510.834.122; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 44.308.826.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 50.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 50.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 49.575.542.590, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	Juni 2017	Desember 2016	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	70.399.642	58.020.000	(8.020.000)	(13,82)
Aset Tetap	49.510.834.122	49.745.574.868	(234.740.746)	(0,47)
Aset Lainnya	44.308.826	40.036.767	4.272.059	10,67
Jumlah Aset	49.625.542.590	49.929.202.195	(303.659.605)	(0,60)
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	58.616.800	(58.616.800)	(100)
Uang Muka dari KPPN	50.000.000	58.020.000	(8.020.000)	(13,82)
Jumlah Kewajiban	50.000.000	116.636.800	(66.636.800)	(57,12)
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	49.575.542.590	49.812.565.395	(237.022.805)	(0,47)
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0
Jumlah Ekuitas Dana	49.575.542.590	49.812.565.395	(237.022.805)	(0,47)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	49.625.542.590	49.929.202.195	(303.695.605)	(0,60)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 23.925.860, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 10.008.847.572 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (9.984.921.712) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 77.003.530 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (9.907.918.182).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 49.812.565.395 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (9.907.918.182) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 9.670.895.377 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2017 adalah senilai Rp. 49.575.542.590.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2016			TA 2015
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	12.147.330	101.826.100	838,26	9.714.904
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		12.147.330	101.826.100	838,26	9.714.904
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	18.537.424.000	8.291.899.827	44,74	8.348.368.084
2.	Belanja Barang	B.2.2.	2.586.076.000	1.138.821.650	44,04	812.654.152
3.	Belanja Modal	B.2.3.	342.000.000	342.000.000	100,00	0
	Jumlah Belanja Negara		21.465.500.000	9.772.721.477	45,53	9.161.022.236

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NERACA PER 30 JUNI 2017 DAN 2016 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	50.000.000	58.020.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.		18.452.360
Persediaan	C.1. 3.	32.899.642	67.118.200
Persediaan yang belum diregister	C.1. 4.	(12.500.000)	0
Jumlah Aset Lancar		70.399.642	143.590.560
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	32.878.550.000	32.878.550.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	7.811.896.217	7.474.896.217
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	19.869.151.302	19.869.151.302
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	157.273.440	157.273.440
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(11.206.036.837)	(10.634.296.091)
Jumlah Aset Tetap		49.510.834.122	49.745.574.868
Piutang Jangka Panjang			
C.3			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	C.3. 1.	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
Jumlah Aset		49.625.542.590	49.929.202.195
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	58.616.800
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	50.000.000	58.020.000
Jumlah Kewajiban		50.000.000	116.636.800
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar			
C.6			
Jumlah Ekuitas Dana		49.575.542.590	49.812.565.395
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		49.575.542.590	49.812.565.395

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2016	30 Juni 2015
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	23.925.860	9.714.904
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	8.251.735.387	8.308.442.084
Beban Persediaan	D. 3	91.944.170	74.888.810
Beban Barang dan Jasa	D. 4	716.227.510	530.449.395
Beban Pemeliharaan	D. 5	313.881.718	194.637.337
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	62.590.100	18.675.870
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	572.468.687	568.816.862
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		10.008.847.572	9.695.926.158
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(9.984.921.712)	(9.686.211.254)
Kegiatan Non Operasional			
		D. 12	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			
Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional		77.003.530	106.850
Pos Luar Biasa			
		D. 13	
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(9.907.918.182)	(9.686.104.404)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	30 Juni 2016
Ekuitas Awal	E. 1	49.812.565.395	50.644.976.338
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(9.907.918.182)	(9.727.541.004)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Lain-lain		0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	86.775.575
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	86.775.575
Transaksi Antar Entitas	E. 8	9.670.895.377	9.151.307.332
Ekuitas Akhir		49.575.542.590	50.155.518.241

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Makassar

Visi Pengadilan Negeri Makassar adalah "Mendukung Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar yang Agung", yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Misi Pengadilan Negeri Makassar adalah :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat,
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain,
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat,
4. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat,
5. Mewujudkan imstitusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati,
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Makassar melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penerimaan/pendaftaran dan pemeriksaan perkara,
2. Meningkatkan penyelesaian permohonan,
3. Meningkatkan penyelesaian perkara,

4. Meningkatkan akseptabilitas pengelolaan penyelesaian perkara,
5. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
6. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap teradilan (aces to justice),
7. Meningkatkan kualitas pengawasan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan

kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah :
Rp. 101.826.100*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 101.826.100 atau mencapai 838,25 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 12.147.330. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.800.000	9.385.500	86,90
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1.347.330	14.540.360	1.079,19
3.	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	77.900.240	0,00
Total Pendapatan			101.826.100	838,25

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Kenaikan pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Negeri Makassar.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2016	2015	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9.385.500	7.020.244	2.365.256	33,69
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	14.540.360	2.694.660	11.845.700	439,59
3.	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	77.900.240	0	77.900.240	0
Total Pendapatan		101.826.100	9.714.904	92.111.96	948,14

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara : Rp.
9.772.721.477*

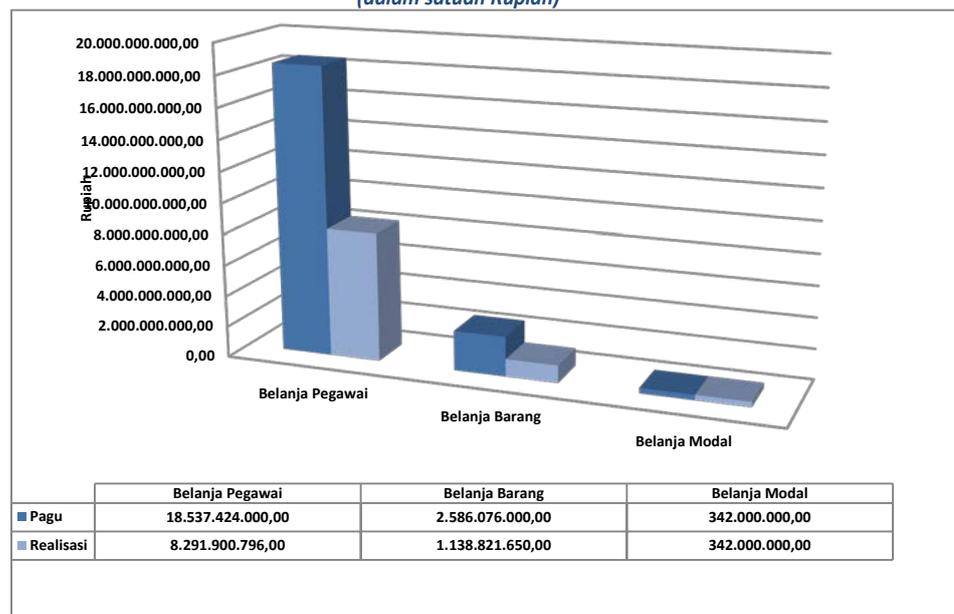
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni TA 2017 adalah sebesar Rp. 9.772.721.477 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 45,53% dari anggaran senilai Rp. 21.465.50.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2017		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	18.537.424.000	8.291.900.796	44,30
Belanja Barang	2.586.076.000	1.138.821.650	44,04
Belanja Modal	342.000.000	342.000.000	100
Total Belanja Bruto	21.465.500.000	9.772.722.446	45,53
Pengembalian Belanja		(969)	0
Total Belanja Netto	21.465.500.000	9.772.721.477	45,53

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2017 & 2016

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	8.291.899.827	8.348.368.084	(56.468.257)	(0,67)
Belanja Barang	1.138.821.650	812.654.152	326.167.498	40,13
Belanja Modal	342.000.000	0	(342.000.000)	(100,00)
Total Belanja	9.161.022.236	9.161.022.236	1.956.970.943	27,16

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp.
8.291.899.827

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 8.348.368.084 dan Rp. 8.348.368.084. Terdapat penurunan belanja pegawai disebabkan beberapa hakim ad hoc pensiun :

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.703.833.800	2.707.821.900	(3.988.100)	(0,14)
Beban Pembulatan Gaji PNS	26.782	30.126	(3.344)	(11,1)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	160.490.360	157.774.650	2.715.710	1,72
Beban Tunj. Anak PNS	53.795.162	55.570.444	(1.775.282)	(3,19)
Beban Tunj. Struktural PNS	18.630.000	13.540.000	5.090.000	37,59
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.211.755.000	2.873.090.000	338.665.000	11,78
Beban Tunj. PPh PNS	452.119.172	542.964.818	(90.845.646)	(16,73)
Beban Tunj. Beras PNS	128.255.820	115.872.000	12.383.820	10,68
Beban Uang Makan PNS	387.352.000	301.346.000	86.006.000	28,54
Beban Tunjangan Umum PNS	14.220.000	17.835.000	(3.615.000)	(20,26)
Beban Tunjangan Kemahalan	197.100.000	151.200.000	45.900.000	30,35
Hakim				
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	964.322.700	1.371.397.400	(407.074.700)	(29,68)
Beban Uang Lembur	0	39.926.000	39.926.000	0,00
Total Belanja Brutto	8.291.900.796	8.348.368.338	(56.467.542)	(0,67)
Pengembalian Belanja	(969)	(254)	(715)	281,49
Total Belanja Netto	8.291.899.827	8.348.368.084	(56.468.257)	(0,67)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang : Rp.
1.138.821.650

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 1.138.821.650 dan Rp. 812.654.152.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	279.004.670	237.661.720	41.342.950	17,39
Belanja Barang Non Operasional	194.749.900	109.563.500	85.186.400	77,75
Belanja Jasa	242.472.940	183.534.775	58.938.165	32,11
Belanja Pemeliharaan	306.839.005	190.001.937	116.837.068	61,49
Belanja Perjalanan Dinas	62.590.100	18.675.870	43.914.230	235,13
Belanja Persediaan	53.165.035	0	53.165.035	100
Total Belanja Brutto	1.138.821.650	812.654.152	326.167.498	40,13
Pengembalian Belanja		0	0	0
Total Belanja Netto	1.138.821.650	812.654.152	326.167.498	40,13

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja
Modal :Rp.
342.000.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 342.000.000 dan Rp. 0.

Belanja modal untuk pembelian komputer, laptop dan sebagainya terserap secara optimal

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	337.000.000	0	337.000.000	0
Belanja Modal Lainnya	5.000.000	0	5.000.000	0
Total Belanja Brutto	342.000.000	0	342.000.000	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	342.000.000	0	342.000.000	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar: Rp.
70.399.642*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 70.399.642 dan Rp. 143.590.560.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2017 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	50.000.000	58.020.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	18.452.360
Persediaan	32.899.642	67.118.200
Persediaan yang belum deregister	(12.500.000)	0
Total Aset Lancar	70.399.642	143.590.560

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran: Rp.
50.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2017	30 Desember TA 2016
1.	Uang Muka dari KPPN	50.000.000	0
	Jumlah	50.000.000	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan: Rp.
32.899.642*

Persediaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 32.899.642 dan Rp. 67.118.200. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Uraian	30 Juni 2017	31 Desember 2016
1	Barang Konsumsi	32.173.850	65.670.300
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	725.792	1.447.900
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		32.899.642	67.118.200

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp.
49.625.542.590*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan Desember 2016 tersaji sebesar Rp. 49.625.542.590 dan Rp. 49.929.202.195. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan
1	Tanah	32.878.550.000	32.878.550.000	0
2	Peralatan dan Mesin	7.811.896.217	7.474.896.217	337.000.000
3	Gedung dan Bangunan	19.869.151.302	19.869.151.302	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	157.273.440	157.273.440	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	60.716.870.959	60.379.870.959	337.000.000
	Akumulasi Penyusutan	(11.206.036.837)	(10.634.296.091)	(571.740.746)
	Nilai Buku Aset Tetap	49.510.834.122	49.745.574.868	(234.740.746)

C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.
32.878.550.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 32.878.550.000 dan Rp. 32.878.550.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	600	SHP No. 78/1977	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	1.532.800.000
2	2	397	SHP No. 41/1992	Dep. Kehakiman RI berkedudukan di Jakarta	Rumah Dinas	321.379.000
3	3	900	SHM No. 544/1980	H. Kalamang	Rumah Dinas	2.881.000.000
4	4	200	SHM No. 674/1982	Hamzy	Rumah Dinas	53.000.000
5	5	200	SHM No. 675/1982	Hamzy	Rumah Dinas	53.000.000
6	6	1.440	SHP No. 60/1992	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	1.753.280.000
7	7	560	SHP. No. 160	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	945.160.000
8	8	1.000	SHP No. 20002/1999	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	1.254.700.000
9	9	306	SHP No. 387/1994	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	949.600.000
10	10	7.187	SHP No. 59/1992	Dep. Kehakiman RI	Kantor	23.134.631.000
Jumlah						32.878.550.000

tidak ada perubahan nilai perolehan aset tetap berupa tanah per 30 Juni 2016 disebabkan tidak ada pengadaan tanah baru dan tidak ada pelepasan hak atas tanah milik Pengadilan Negeri Makassar.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin :
Rp. 7.811.896.217*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.811.896.217 dan Rp. 7.474.896.217.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	7.474.896.217
Mutasi Tambah	
Pembelian	337.000.000
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2016	7.811.896.217
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2016	(6.014.815.355)
Nilai Buku 30 Juni 2016	1.797.080.862

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada semester I Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 337.000.000,-. Nilai perolehan Aset bertambah sebesar Rp. 337.000.000 disebabkan penginputan pembelian belanja modal peralatan dan mesin.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
19.869.151.302*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.869.151.302 dan Rp. 19.869.151.302.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 30 Desember 2016	19.869.151.302
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2017	19.869.151.302
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	5.189.721.482
Nilai Buku 30 Juni 2017	14.679.429.820

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan , Irigasi,
dan Jaringan : Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Desember 2015	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2016	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2016	0
Nilai Buku 30 Juni 2016	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya:
Rp. 157.273.440*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 157.273.440 dan Rp. 157.273.440.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	157.273.440
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	157.273.440
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	1.500.000
Nilai Buku 30 Juni 2017	155.773.440

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(11.206.036.837)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp. (11.206.036.837) dan Rp. (10.634.296.091).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2016 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7.811.896.217	(6.014.815.355)	1.797.080.862
2	Gedung dan Bangunan	19.869.151.302	(5.189.721.482)	14.679.429.820
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	157.273.440	(1.500.000)	155.773.440
Jumlah		27.838.320.959	(11.206.036.837)	16.632.284.122

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi : Rp. 0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No.	Debitur	Jumlah (Rp.)
Jumlah Total		0

Mutasi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek :
Rp. 50.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp. 116.636.800. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2016 tercatat sebesar Rp. 116.636.800.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2017 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 20. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Utang kepada Pihak ketiga	0	58.616.800
Uang Muka dari KPPN	50.000.000	58.020.000
Jumlah	50.000.000	116.636.800

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN:
Rp. 50.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp. 58.020.000. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan Piutang:
Rp. 49.575.542.590*

Ekuitas per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.

49.575.542.590 dan Rp. 50.155.518.241. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2017 terdapat penurunan nilai Kewajiban sebesar Rp. (66.636.800) (57,13%) dari nilai per 31 Desember TA 2016. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 50.000.000, sedangkan per 31 Desember TA 2015 tercatat sebesar Rp. 116.636.800.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan PNbp :
Rp. 23.925.860* Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 23.925.860 dan Rp. 9.714.904. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.800.000	9.385.500	86,90
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1.347.330	14.540.360	1.079,19
3	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	0	0,00
Total Pendapatan		12.147.330	23.925.860	838,25

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai : Rp.
8.251.735.387* Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.251.735.387 dan Rp. 8.308.442.084. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.720.133.511	2.707.821.900	12.311.611	0,45
Beban Pembulatan Gaji PNS	25.868	29.872	(4.004)	(13,40)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	162.120.331	157.774.650	4.345.681	2,75
Beban Tunj. Anak PNS	54.317.785	55.570.444	(1.252.659)	(2,25)
Beban Tunj. Struktural PNS	18.630.000	13.540.000	5.090.000	37,59
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.211.755.000	2.873.090.000	338.665.000	11,78
Beban Tunj. PPh PNS	452.119.172	542.964.818	(90.845.646)	(16,73)
Beban Tunj. Beras PNS	128.255.820	115.872.000	12.383.820	10,68
Beban Uang Makan PNS	328.735.200	301.346.000	27.389.200	9,08
Beban Tunjangan Umum PNS	14.220.000	17.835.000	(3.615.000)	(20,26)
Beban Tunjangan Kemahalan	197.100.000	151.200.000	45.900.000	30,35
Hakim				
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	964.322.700	1.371.397.400	(407.074.700)	(29,68)
Total Beban Pegawai	8.251.735.387	8.308.442.084	(407.074.700)	20,38

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan : Rp.
91.944.170*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 91.944.170 dan Rp. 74.904.610. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	91.890.170	74.888.810	31.419.600	22,70
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	54.000	15.800	38.200	241,77
Total Beban Persediaan	76.104.610	39.860.240	36.244.370	264,47

D.4. Beban Jasa

*Beban Jasa : Rp.
242.472.940*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 242.472.940 dan Rp. 183.534.775. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	222.852.622	183.534.775	39.317.847	21,42
Beban Langganan Telepon	19.620.318	0	19.620.318	0
Beban Langganan Air	0	0	0	0
Beban Sewa	0	0	0	0
Total Beban Jasa	242.472.940	183.534.775	58.938.165	32,11

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:
Rp. 313.881.718*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 313.881.718 dan Rp. 194.637.337. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	181.979.900	110.316.000	71.663.900	64,96
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.972.105	59.774.937	41.197.168	68,92
Beban Pemeliharaan Jaringan	23.887.000	19.826.000	4.061.000	20,48
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7.042.713	4.720.000	2.322.313	49,19
Total Beban Pemeliharaan	313.881.718	194.637.337	119.244.381	61,26

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas : Rp. 62.590.100*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan

2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 62.590.100 dan Rp. 18.675.870. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	56.870.100	9.435.870	47.434.230	502,70
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	5.720.000	9.240.000	(3.520.000)	(38,09)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	62.590.100	18.675.870	43.914.230	235,13

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp .0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp. 0
Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 572.468.687
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 572.468.687 dan Rp. 568.816.862. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	322.034.664	319.231.122	2.803.542	0,87
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	249.706.082	249.585.740	120.342	0,04
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam operasional pemerintah	727.941	0	727.941	0
Jumlah Penyusutan				
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	572.468.687	568.816.862	3.651.825	0,64

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan

2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Surplus Kegiatan Non Operasional : Rp. 77.003.530

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional	78.071.430	210.600	77.860.830	36.970
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.067.900	103.750	964.150	929,30
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	77.003.530	314.350	76.689.180	24.396

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah

sebagai berikut :

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBPNP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp. 49.812.565.395 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 49.812.565.395 dan Rp. 50.644.976.338.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp. (9.907.918.182) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. (9.907.918.182) dan Rp. (9.727.541.004). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp. 0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap :
Rp. 0 Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 86.775.575.

E.5. Koreksi atas Beban

Koreksi Aset Beban :
Rp. 0 Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 50 Rincian Koreksi atas Beban
per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E.6. Koreksi atas Pendapatan

**Koreksi atas
Pendapatan : Rp. 0** Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 51 Rincian Koreksi atas Pendapatan
per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp. 49.575.542.590 Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 49.575.542.590 dan Rp. 50.155.518.241.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK pada semester ini

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Makassar adalah:

1. MANDIRI KC. MAKASSAR KARTINI A/C 152-009603674-0 a.n. BPg 136 PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (099422) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.0.
2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA A/C 0050-01001094-30-4 a.n. BPg 136 PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (099423) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.0.
3. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar A/C 00372-01-30-000042-4 a.n. RPL 136 PN Makassar Utk PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 14.148.466.207

F.2.4. Revisi DIPA

Tidak ada informasi mengenai ralat SPM di laporan semester ini

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Terdapat ralat SPM berupa uraian SPM (terlampir)

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat catatan penting lainnya

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Makassar

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2016

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin		7.845.987.693	6.043.352.691	1.802.635.002
1.	Alat Bantu	7	1.598.486.077	622.085.028	976.401.049
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	941.965.092	853.864.763	88.100.329
3.	Alat Kantor	5	767.195.804	495.137.804	272.058.000
4.	Alat Rumah Tangga	5	2.389.510.893	2.120.619.017	268.891.876
5.	Alat Studio	5	322.765.005	273.565.749	49.199.256
6.	Alat Komunikasi	5	16.940.000	16.940.000	0
7.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	0	0	0
8.	Komputer Unit	4	1.460.046.245	1.347.138.314	112.907.931
9.	Peralatan Komputer	4	347.278.577	312.202.016	35.076.561
10.	Peralatan Olah Raga	3	1.800.000	1.800.000	0
B.	Gedung dan Bangunan		19.869.151.302	5.189.721.482	14.679.429.820
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	17.744.487.301	4.587.745.732	13.156.741.569
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2.124.664.001	601.975.750	1.522.688.251
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		1.500.000	1.500.000	0
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	0	0	0
2.	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	-	0	0	0
3.	Barang Bercorak Kesenian	4	1.500.000	1.500.000	0
4.	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	-	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan				
1.	Alat Kantor	5			
2.	Alat Rumah Tangga	5			
3.	Alat Studio	5			
4.	Alat Komunikasi	5			
5.	Alat Kedokteran	5			

6. Komputer Unit	4			
7. Peralatan Komputer	4			
8. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	49.500.000	10.191.174	39.308.826
9. Bahan Perpustakaan Tercetak	-			
10. Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	-			
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		27.766.138.995	11.244.765.347	16.521.373.648
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			1.500.000	

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas Laporan
Keuangan

005
01
1900
099422

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2017